



KEMENTERIAN KEUANGAN  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA  
KANTOR WILAYAH DJKN BANTEN  
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SERANG

**KPKNL**  
Serang



# LAPORAN KINERJA TAHUN 2021

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Serang

## KATA PENGANTAR

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka setiap Instansi Pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja.

Berpedoman dengan peraturan tersebut maka KPKNL Serang telah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2021 sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis serta Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan.

Laporan capaian kinerja tahun 2021 KPKNL Serang menyajikan hasil pencapaian terhadap 10 (sepuluh) Sasaran Strategis *Kemenkeu Three* KPKNL dengan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama, yang berhasil mencapai Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Tahun 2021 sebesar 107,38% beserta hasil analisa atas capaian tersebut.

Demikian Laporan Kinerja Tahun 2021 ini disusun dengan harapan agar dapat memberikan gambaran yang jelas dan transparan, sekaligus merupakan pertanggungjawaban atas upaya pencapaian tujuan/sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi yang diamanahkan kepada KPKNL Serang.

Serang, 02 Februari 2022

Kepala KPKNL Serang

Laila Chairani

**DAFTAR ISI**

Kata Pengantar	i	
Daftar Isi	ii	
Ringkasan Eksekutif	iii	
<b>BAB I</b>	<b>P E N D A H U L U A N</b>	
	A. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi	1
	B. Peran Strategis KPKNL Serang	5
	D. Sistematika Laporan	9
<b>BAB II</b>	<b>RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA</b>	
	A. Rencana Strategis	10
	B. Penetapan Kinerja	11
<b>BAB III</b>	<b>AKUNTABILITAS KINERJA DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN</b>	
	A. Capaian Kinerja Organisasi	14
	B. Kualitas Pelaksanaan Anggaran	33
<b>BAB IV</b>	<b>PENUTUP</b>	34

## RINGKASAN EKSEKUTIF

### A. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Pertanggungjawaban KPKNL Serang dalam pencapaian tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan disampaikan kepada pemangku kepentingan melalui Laporan Kinerja Tahun 2021 yang memuat pencapaian sasaran/tujuan strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai bahan monitoring dan evaluasi serta basis perencanaan kinerja tahun berikutnya dalam rangka pencapaian Visi DJKN yaitu: “Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 5 (lima) misi yaitu:

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang, KPKNL Serang menyelenggarakan fungsi:

1. inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
2. registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
3. pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
4. pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
5. pelaksanaan pelayanan penilaian;
6. pelaksanaan pelayanan lelang;
7. penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
8. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;

9. verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
10. pelaksanaan administrasi KPKNL.

Dalam perencanaan kegiatan, Kementerian Keuangan telah menetapkan kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC) untuk melengkapi Sistem Akuntabilitas Kinerja sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014.

Laporan Kinerja KPKNL Serang Tahun 2021 terdiri dari 10 (sepuluh) Sasaran Strategis dan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU).

Seluruh pegawai KPKNL Serang bertekad untuk melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dengan penuh integritas, profesionalisme, sinergi, pelayanan dan kesempurnaan sesuai Nilai - Nilai Kementerian Keuangan.

## B. PENCAPAIAN SASARAN STRATEGIS

Berdasarkan hasil pengukuran dengan menggunakan *Balanced Scorecard* (BSC), rata-rata tingkat pencapaian kinerja terhadap 19 (sembilan belas) IKU yang merupakan penjabaran dari 10 (sepuluh) sasaran strategis Kemenkeu Three KPKNL Serang tahun 2021 adalah sebesar 107,38% dengan rincian sebagai berikut:

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Nilai
<b>Stakeholder Perspective (25%)</b>				
1	<b>Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal</b>			
1a-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK	62,00%	86,60%	120,00%
1b-CP	Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100,00%	77,54%	77,54%
1c-CP	Persentase Penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDS s.d 2017)	100,00%	159,04%	120,00%
<b>Customer Perspective (15%)</b>				
2	<b>Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa</b>			
2a-CP	Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	88,00	98,96	112,45%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100,00%	89,83%	89,83%
3	<b>Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien</b>			
3a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	4,57	4,65	101,75%

<b>Internal Process Perspective (30%)</b>				
<b>4</b>	<b>Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif</b>			
4a-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan	100,00%	100,00%	100,00%
4b-CP	Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	100,00%	100,00%	100,00%
4c-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	22,00%	0,03%	120,00%
<b>5</b>	<b>Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif</b>			
5a-CP	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	100,00%	123,53%	120,00%
5b-CP	Persentase produktivitas lelang	35,00%	27,37%	78,19%
5c-CP	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	92,00%	96,73%	105,14%
5d-CP	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	12,50%	4,13%	120,00%
<b>6</b>	<b>Edukasi yang Efektif</b>			
6a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	92,00	94,81	103,05%
<b>7</b>	<b>Pengawasan dan pengendalian yang efektif</b>			
7a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset	85,00%	88,24%	103,81%
<b>Learning and Growth Perspective (30%)</b>				
<b>8</b>	<b>Edukasi yang efektif</b>			
8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100,00%	120,00%	120,00%
<b>9</b>	<b>Organisasi yang fit for purpose</b>			
9a-N	Nilai hasil <i>review</i> pengelolaan kinerja berbasis BSC	75,00	95,19	120,00%
9b-N	Indeks efektivitas penyelenggaraan FGD Pejabat Administrator	80,00	96,95	120,00%
<b>10</b>	<b>Pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal</b>			
10a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,50%	95,45%	99,95%
<b>Nilai Kinerja Organisasi (NKO)</b>				<b>107,38%</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Serang merupakan unit Eselon III di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 263/PMK.01/2016. Dalam perkembangannya, pada tanggal 28 Oktober 2021 telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang mencabut kedua Peraturan Menteri Keuangan terdahulu. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu pada tanggal 29 Oktober 2021.

Berdasarkan Pasal 30 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021, KPKNL mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang. Dalam melaksanakan tugas dimaksud, KPKNL menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu :

1. inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
2. registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
3. pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara;
4. pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan, penatausahaan, penagihan dan optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara;
5. pelaksanaan pelayanan penilaian;
6. pelaksanaan pelayanan lelang;
7. penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, dan lelang;
8. pelaksanaan pemberian pertimbangan dan advokasi pengurusan piutang negara dan lelang;
9. verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang; dan
10. pelaksanaan administrasi KPKNL.

Berdasarkan Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021, wilayah kerja KPKNL Serang meliputi Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, dan Kabupaten Lebak. Berikut ini adalah peta wilayah kerja KPKNL Serang:

**Gambar 1**  
**Peta Wilayah Kerja KPKNL Serang**



KPKNL dipimpin oleh Kepala kantor yang merupakan pejabat eselon III, dan terdiri dari 5 (lima) seksi/subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional dengan rincian sebagai berikut :

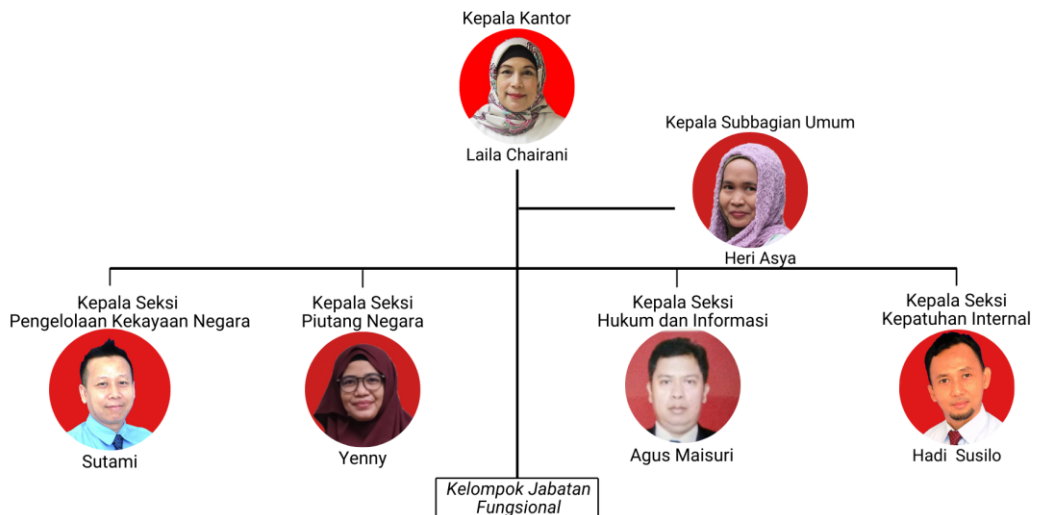
1. Subbagian Umum;
2. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara;
3. Seksi Piutang Negara;
4. Seksi Hukum dan Informasi;
5. Seksi Kepatuhan Internal; dan
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berikut ini adalah bagan struktur organisasi pada KPKNL menurut Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2021 serta struktur organisasi pada KPKNL Serang:

**Gambar 2**  
**Struktur Organisasi KPKNL Menurut PMK Nomor 154/PMK.01/2021**



**Gambar 3**  
**Struktur Organisasi KPKNL Serang per 31 Desember 2021**  
**Struktur Organisasi KPKNL Serang**



Pada Tahun 2021 untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KPKNL Serang dilaksanakan oleh 35 (tiga puluh lima) orang pegawai dengan komposisi sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**SDM Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin**

No.	Golongan	Laki – Laki	Perempuan	Total Orang
1.	I	0	0	0
2.	II	6	2	8
3.	III	15	7	22
4.	IV	2	3	5
<b>TOTAL</b>		<b>23</b>	<b>12</b>	<b>35</b>

**Tabel 2**  
**SDM Berdasarkan Usia dan Golongan**

Kelompok Umur	Golongan Ruangan				Jumlah
	I	II	III	IV	
18 – 30	-	3	3		6
31 – 40	-	4	9		13
41 – 50	-	1	3	4	8
Di atas 50	-		7	1	8
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	<b>22</b>	<b>5</b>	<b>35</b>

**Tabel 3**  
**SDM Berdasarkan Pendidikan dan Golongan**

No.	Tingkat Pendidikan	Golongan				Total Pegawai
		I	II	III	IV	
1.	SD	-	-	-	-	-
2.	SLTP	-	-	-	-	-
3.	SLTA/DI/DII	-	1	4	-	5
4.	DIII	-	1	-	-	1
5.	DIV/Sarjana	-	7	16	-	23
6.	Pasca Sarjana/Master	-	-	1	5	6
7.	Doktor/S3	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>		<b>-</b>	<b>9</b>	<b>21</b>	<b>5</b>	<b>35</b>

**Tabel 4**  
**SDM Berdasarkan Jabatan Struktural dan Fungsional**

No.	Uraian	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
	<i>Struktural:</i>					
1.	Kepala Kantor	-	-	-	1	1
2.	Subbagian Umum	-	5	4	-	9
3.	Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara	-	1	3	-	4
4.	Seksi Piutang Negara	-	-	2	1	3
5.	Seksi Hukum dan Informasi	-	1	5	-	6
6.	Seksi Kepatuhan Internal	-	-	3	1	4
	<i>Fungsional:</i>					
1.	Pelelang Ahli Muda	-	-	1	1	2
2.	Pelelang Ahli Pertama	-	-	1	-	1
3.	Penilai Pemerintah Ahli Muda	-	-	-	1	1
4.	Penilai Pemerintah Ahli Pertama	-	-	3	-	3
5.	Pranata keuangan APBN Terampil	-	1	-	-	1
<b>Jumlah</b>		-	<b>8</b>	<b>22</b>	<b>5</b>	<b>35</b>

## **B. PERAN STRATEGIS KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SERANG**

Sebagai organisasi yang memiliki tugas memberikan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang, KPKNL Serang memiliki peran strategis sebagai berikut:

### **1. Pengelolaan kekayaan negara**

Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, bimbingan teknis, penatausahaan dan akuntansi serta penyusunan laporan/daftar barang milik negara/kekayaan negara.

Sebagai pengelola kekayaan negara, KPKNL Serang turut berperan dalam mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara dengan tujuan meningkatkan daya

guna dan hasil guna kekayaan negara yang difokuskan pada upaya pemanfaatan kekayaan negara, pengamanan kekayaan negara dan penatausahaan kekayaan negara. KPKNL Serang selaku *asset manager* juga mengemban tugas menata manajemen aset negara dan menjadikan aset sebagai salah satu indikator peningkatan efektivitas APBN, yaitu melalui optimalisasi aset dalam rangka peningkatan pendapatan negara berupa PNBPN dan penghematan belanja modal dan belanja pemeliharaan.

## 2. Penilaian

Sebagai bagian dari transformasi yang terjadi pada DJKN, Seksi Pelayanan Penilaian pada akhir tahun 2021 mengalami peleburan menjadi Kelompok Jabatan Fungsional, yaitu Penilai Pemerintah Ahli Muda dan Penilai Pemerintah Ahli Pertama. Penilaian terhadap kekayaan negara merupakan bagian dari proses pengelolaan kekayaan negara. Proses penilaian dilakukan setelah adanya analisis oleh pengelola barang yang bertujuan untuk menuju optimalisasi pengelolaan kekayaan negara. Kegiatan penilaian tersebut dimaksudkan untuk memperoleh estimasi atau perkiraan nilai wajar dan nilai sewa wajar dari setiap kekayaan negara berupa tanah, bangunan, kendaraan dan barang milik negara lainnya yang berada pada lingkup Kementerian/Lembaga Negara. Di sisi lain, nilai pasar dan nilai likuidasi dilakukan terhadap objek penilaian yang merupakan barang jaminan proses pengurusan piutang negara oleh PUPN.

Hasil penilaian barang milik negara tersebut akan digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara, dan pengurusan piutang negara. Dengan demikian hasil penilaian dapat membantu mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang optimal, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *The Highest and Best Use*.

## 3. Pengurusan Piutang Negara

Seksi Piutang Negara mempunyai tugas penyiapan bahan pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara, bimbingan teknis, dan pembinaan, penatausahaan, penagihan serta optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara.

Pengurusan Piutang Negara bertujuan untuk mengamankan keuangan negara dengan melakukan penagihan dan pengurusan piutang macet yang berasal dari instansi pemerintah dan badan – badan usaha yang dikuasai oleh negara baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan perjanjian, peraturan perundangan, dan sebab apapun. Sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor

77/PUU-IX/2011 tanggal 25 September 2012, piutang macet yang berasal dari BUMN perbankan, pengurusannya tidak lagi diserahkan kepada PUPN, sehingga fokus pengurusan dilakukan terhadap piutang negara yang telah diserahkan dan piutang negara yang berasal dari instansi pemerintah. Selain itu, juga terdapat penyerahan piutang negara dari sejumlah Obligor Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS), aset eks Bank Dalam Likuidasi (BDL) dan BPPN yang permasalahannya sangat kompleks. Pada tahun 2021, KPKNL Serang juga melaksanakan *crash program* Keringanan Utang sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.06/2021 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah Yang Diurus/Dikelola Oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Dengan Mekanisme *Crash Program* Tahun Anggaran 2021.

#### 4. Pelayanan lelang

Seperti Seksi Pelayanan Penilaian, pada akhir tahun 2021 Seksi Pelayanan Lelang pun bertransformasi menjadi Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari Pelelang Ahli Muda dan Pelelang Ahli Pertama. Pelayanan lelang bertujuan untuk menjadikan lelang sebagai sarana transaksi penjualan aset secara umum, sebagaimana fungsi pasar pada umumnya. Selain itu, lelang merupakan pelaksanaan eksekusi terhadap suatu putusan/penetapan pengadilan maupun PUPN.

Lelang mempunyai manfaat nilai lebih dibandingkan dengan transaksi jual beli biasa, yaitu lebih transparan, akuntabel, efisien, dan dapat lebih menjamin kepastian hukum. Risalah Lelang yang merupakan akta otentik berfungsi sebagai *akta van transport* untuk kepentingan peralihan hak. KPKNL Serang diharapkan menjadi akselerator agar paradigma lelang meresap kedalam *mindset* masyarakat, sehingga memandang lelang seperti pelaksanaan jual beli biasa dan dapat berperan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat.

Seiring dengan perkembangan teknologi digital, DJKN melakukan inovasi dalam pelayanan lelang dengan pelaksanaan lelang melalui internet (e-auction). Sebagai pedoman pelaksanaan e-auction telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2016. Sesuai peraturan ini, e-auction dapat digunakan untuk lelang eksekusi, lelang noneksekusi wajib, maupun lelang noneksekusi sukarela. Salah satu keunggulan e-auction adalah pelaksanaan lelang menjadi lebih praktis, karena peminat lelang dapat menawar dari mana saja, tanpa perlu hadir langsung. Lelang e-auction dapat diakses melalui laman lelang.go.id atau dari smartphone berbasis Android melalui aplikasi Lelang Indonesia.

## 5. Subbagian Umum

Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan pemantauan program serta dukungan teknis bagi pemangku jabatan fungsional, urusan sumber daya manusia, analisis beban kerja, keuangan, tata usaha, rumah tangga, kearsipan, perencanaan, pengadaan, penatausahaan, pengamanan, dan pengawasan Barang Milik Negara serta pengelolaan area terpadu di lingkungan KPKNL.

Sebagai *supporting unit* Subbagian Umum memegang peranan penting terciptanya pelayanan yang memadai kepada para pengguna jasa. Pada tahun 2021 dimana pandemi Covid-19 masih terjadi, Subbagian Umum melakukan *refocusing* atas DIPA KPKNL Serang tahun 2021 untuk penanganan Covid-19 dan mendukung pemulihan ekonomi nasional disamping tetap menjalankan pengeluaran operasional rutin dan non operasional untuk pelayanan kepada pengguna jasa melalui seksi teknis. Subbagian Umum juga melakukan manajemen SDM pada KPKNL Serang dengan melakukan pemetaan SDM dan menempatkannya sesuai dengan kompetensinya. Selain itu, Subbagian Umum juga melakukan penatausahaan atas BMN yang tercatat dalam daftar barang KPKNL Serang.

## 6. Hukum dan Informasi

Seksi Hukum dan Informasi mempunyai tugas melakukan penanganan perkara, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan, implementasi sistem aplikasi, penyiapan bahan penyusunan rencana strategik, laporan akuntabilitas, dan laporan tahunan, penatausahaan berkas kasus piutang negara, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang.

## 7. Kepatuhan Internal

Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

### **C. SISTEMATIKA LAPORAN**

Untuk memudahkan dalam memahami isi laporan, maka digunakan sistematika pelaporan sebagai berikut :

BAB I   Pendahuluan

BAB II   Rencana Strategis dan Penetapan Kinerja

BAB III   Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan

BAB IV   Penutup

Sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana yang ditetapkan dimaksud, selama tahun 2021 KPKNL Serang telah melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti diuraikan dalam Bab II Laporan ini.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2021 diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam upaya peningkatan kinerja KPKNL Serang di tahun yang akan datang.

## BAB II

### RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

#### A. RENCANA STRATEGIS

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam suatu periode waktu dengan memperhatikan potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. Perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis.

Dalam mengemban tugas dan fungsi yang telah ditetapkan, KPKNL Serang mempunyai visi: “Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Untuk merealisasikan visi tersebut, KPKNL Serang mempunyai misi sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
5. Mewujudkan lelang yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Atas dasar visi dan misi yang telah ditetapkan tersebut maka tujuan yang hendak dicapai oleh KPKNL Serang sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2021-2024 adalah:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial;
2. Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya;
3. Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien;
4. Birokrasi dan layanan publik DJKN yang *agile*, efektif, dan efisien.

Pada dasarnya sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara spesifik, dalam jangka pendek dan terukur. Adapun sasaran yang hendak dicapai KPKNL Serang untuk Tahun Anggaran 2021 meliputi :

1. Pengelolaan kekayaan negara yang optimal;
2. Pengelolaan kekayaan negara yang memenuhi harapan pengguna jasa
3. Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif, dan efisien;

4. Penerapan tata kelola kekayaan negara dan penilaian yang efektif;
5. Penerapan tata kelola piutang negara dan lelang yang efektif;
6. Edukasi yang efektif;
7. Pengawasan dan pengendalian yang efektif;
8. SDM yang kompeten;
9. Organisasi yang *fit for purpose*; dan
10. Pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal.

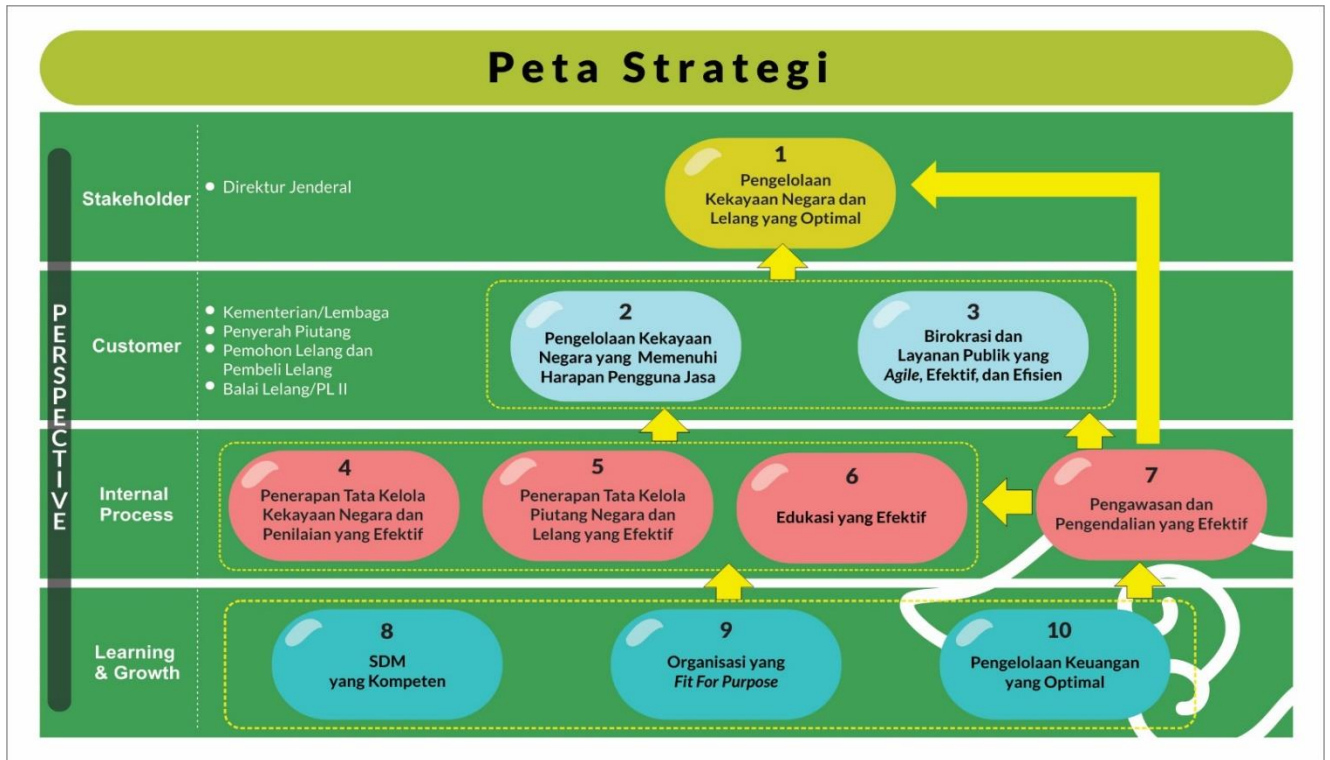
## B. PENETAPAN KINERJA

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, setiap instansi diwajibkan untuk menyusun Kontrak Kinerja sebagai penjabaran operasional Rencana Strategis. Dalam Kontrak Kinerja, setiap rumusan sasaran strategis dilengkapi dengan rumusan indikator kinerja serta target kinerjanya.

Selanjutnya, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, instansi pemerintah diwajibkan menyusun dokumen Penetapan Kinerja yang merupakan kontrak/perjanjian kinerja dan Laporan Kinerja interim dan tahunan. Dokumen Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi dalam hal ini KPKNL Serang.

Untuk menjamin tercapainya sasaran dan target secara optimal dan tepat waktu, visi dan misi KPKNL Serang harus menjadi acuan sekaligus landasan penyusunan strategi. *Balance Score Card* (BSC) merupakan suatu konsep yang menjabarkan strategi menjadi suatu tindakan dengan menetapkan tujuan strategisnya. Tujuan strategis merupakan faktor utama yang harus ada dalam BSC yang kemudian dikembangkan menjadi sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerjanya. Tujuan strategis ini dipetakan kedalam suatu peta strategi. Dalam hal ini, peta strategi Kemenkeu Three KPKNL Serang tahun 2021 mempunyai 4 (empat) perspektif, yaitu: *Stakeholders Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective*, dan *Learning and Growth Perspective*. Ketiga perspektif tersebut kemudian diuraikan kedalam 10 (sepuluh) Sasaran Strategis (SS) dengan peta strategis sebagai berikut:

**Gambar 4**  
**Peta Strategi KPKNL Serang**



Dalam melaksanakan rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya, KPKNL Serang telah membuat suatu penetapan kinerja yang merupakan ikhtisar dari rencana kerja yang akan dicapai pada satu waktu tertentu. Penetapan Kinerja KPKNL Serang tahun 2021 sesuai dengan peta strategis Kemenkeu Three Tahun 2021 terdiri dari 10 (sepuluh) Sasaran Strategis (SS) dan 19 (sembilan belas) Indikator Kinerja Utama (IKU). Rincian selengkapnya tentang SS dan IKU tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini:

**Tabel 5**  
**Penetapan Kinerja Berdasarkan Peta Strategi Tahun 2021**

<b>Kode SS/IKU</b>	<b>Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama</b>	<b>Target</b>
<b>Stakeholder Perspective (25%)</b>		
<b>1</b>	<b>Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal</b>	
1a-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK	62,00%
1b-CP	Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100,00%
1c-CP	Persentase Penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDS s.d 2017)	100,00%
<b>Customer Perspective (15%)</b>		
<b>2</b>	<b>Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa</b>	
2a-CP	Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	88,00
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100,00%
<b>3</b>	<b>Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien</b>	
3a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	4,57
<b>Internal Process Perspective (30%)</b>		
<b>4</b>	<b>Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif</b>	
4a-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan	100,00%
4b-CP	Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	100,00%
4c-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	22,00%
<b>5</b>	<b>Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif</b>	
5a-CP	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	100,00%
5b-CP	Persentase produktivitas lelang	35,00%
5c-CP	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	92,00%
5d-CP	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	12,50%
<b>6</b>	<b>Edukasi yang Efektif</b>	
6a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	92,00
<b>7</b>	<b>Pengawasan dan pengendalian yang efektif</b>	
7a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset	85,00%
<b>Learning and Growth Perspective (30%)</b>		
<b>8</b>	<b>Edukasi yang efektif</b>	
8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100,00%
<b>9</b>	<b>Organisasi yang fit for purpose</b>	
9a-N	Nilai hasil review pengelolaan kinerja berbasis BSC	75,00
9b-N	Indeks efektivitas penyelenggaraan FGD Pejabat Administrator	80,00
<b>10</b>	<b>Pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal</b>	
10a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,50%

### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

### A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2021 terhadap 19 (sembilan belas) IKU KPKNL Serang Tahun 2021, diperoleh hasil sebagai berikut:

- 15 (lima belas) IKU memperoleh hasil maksimal dengan persentase capaian kinerja  $\geq 100\%$  (indikator warna hijau);
- 2 (dua) IKU memperoleh hasil capaian kurang  $<100\%$  s.d.80% (indikator warna kuning);
- 2 (dua) IKU memperoleh hasil kurang dari 80% (indikator warna merah).

Adapun rincian tabel terhadap capaian kinerja atas 19 (sembilan belas) IKU dimaksud adalah sebagai berikut :

**Tabel 6**  
**Capaian Kinerja Tahun 2021**

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Nilai
<b>Stakeholder Perspective (25%)</b>				
1	<b>Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal</b>			
1a-CP	Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK	62,00%	86,60%	120,00%
1b-CP	Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	100,00%	77,54%	77,54%
1c-CP	Persentase Penurunan outstanding piutang negara (Saldo PNDS s.d 2017)	100,00%	159,04%	120,00%
<b>Customer Perspective (15%)</b>				
2	<b>Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa</b>			
2a-CP	Indeks Ketepatan waktu layanan kekayaan negara dan Lelang	88,00	98,96	112,45%
2b-CP	Persentase realisasi pokok lelang	100,00%	89,83%	89,83%
3	<b>Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien</b>			
3a-CP	Indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL	4,57	4,65	101,75%
<b>Internal Process Perspective (30%)</b>				
4	<b>Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif</b>			

4a-CP	Persentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan	100,00%	100,00%	100,00%
4b-CP	Persentase implementasi evaluasi kinerja BMN (portofolio aset)	100,00%	100,00%	100,00%
4c-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	22,00%	0,03%	120,00%
<b>5</b>	<b>Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif</b>			
5a-CP	Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN	100,00%	123,53%	120,00%
5b-CP	Persentase produktivitas lelang	35,00%	27,37%	78,19%
5c-CP	Persentase pelaksanaan lelang e-auction dan e-conventional auction	92,00%	96,73%	105,14%
5d-CP	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	12,50%	4,13%	120,00%
<b>6</b>	<b>Edukasi yang Efektif</b>			
6a-N	Tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi	92,00	94,81	103,05%
<b>7</b>	<b>Pengawasan dan pengendalian yang efektif</b>			
7a-CP	Persentase tindak lanjut persetujuan pengelolaan aset	85,00%	88,24%	103,81%
<b>Learning and Growth Perspective (30%)</b>				
<b>8</b>	<b>Edukasi yang efektif</b>			
8a-N	Persentase pengembangan kompetensi pegawai	100,00%	120,00%	120,00%
<b>9</b>	<b>Organisasi yang fit for purpose</b>			
9a-N	Nilai hasil <i>review</i> pengelolaan kinerja berbasis BSC	75,00	95,19	120,00%
9b-N	Indeks efektivitas penyelenggaraan FGD Pejabat Administrator	80,00	96,95	120,00%
<b>10</b>	<b>Pengelolaan keuangan dan BMN yang optimal</b>			
10a-CP	Persentase kualitas pelaksanaan anggaran	95,50%	95,45%	99,95%
<b>Nilai Kinerja Organisasi (NKO)</b>				<b>107,38%</b>

Berikut ini adalah uraian analisis dan evaluasi kinerja terhadap 10 (sepuluh) Sasaran Strategis Kemenkeu *Three* KPKNL Serang Tahun 2021 untuk setiap Indikator Kinerja Utama:

## 1. Pengelolaan Kekayaan Negara Yang Optimal

### a. Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN Dengan SBSK (1a-CP)

Tabel 7

Capaian IKU Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN Dengan SBSK

KPKNL SERANG	Nama Sasaran Strategis : Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal							
	Nama IKU : Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan SBSK							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Pol/ K P
Target	-	50%	50%	55%	55%	62%	62%	Max/TLK
Realisasi	-	81,03%	81,03%	85,48%	85,48%	86,60%	86,60%	
Capaian	-	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Perhitungan Tingkat Kesesuaian Penggunaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) yang merupakan hasil perhitungan tingkat kesesuaian penggunaan dan hasil pengelolaan BMN sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Target tahun 2021 adalah 62,00% dengan realisasi sebesar 86,60% dengan sampel pengukuran sebanyak 50 Nomor Urut Pendaftaran (NUP) BMN. Dalam mencapai target IKU ini ada permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target, yaitu satuan kerja belum mendapat sosialisasi terkait pengisian SBSK. Adapun tindakan yang telah dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah melakukan koordinasi dengan Kanwil dan Kantor Pusat DJKN terkait dengan pelaksanaan pengukuran tingkat kesesuaian penggunaan BMN pada SBSK, mengirim surat kepada satuan kerja yang menjadi target pengukuran SBSK, dan menindaklanjuti perhitungan SBSK BMN. Sementara rencana aksi yang akan dilakukan adalah melakukan sosialisasi pengisian SBSK kepada satuan kerja di wilayah KPKNL Serang.

### b. Persentase Penerimaan Negara Dari Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Lelang (1b-CP)

Tabel 8

Capaian IKU Persentase Penerimaan Negara Dari Pengelolaan Kekayaan Negara Dan Lelang

KPKNL SERANG	Nama Sasaran Strategis : Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal							
	Nama IKU : Persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Pol/ K P
Target	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	8,79%	17,58%	17,58%	25,36%	25,36%	77,54%	77,54%	
Capaian	87,93%	58,59%	58,59%	42,26%	42,26%	77,54%	77,54%	

Target nilai penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara tahun 2021 sebesar Rp14.611.400.050,00 dengan rincian Target PNBPN Pengelolaan BMN Rp5.608.400.000,00, Target PNBPN Piutang Negara Rp90.000.050,00, dan Target PNBPN Lelang Rp8.919.000.000,00.

Adapun realisasi nilai penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara sampai dengan Triwulan IV Tahun 2021 sebesar Rp11.329.561.145,00 yang terdiri atas Realisasi PNBPN Pengelolaan BMN Rp3.947.090.314,00 (70,38%), Realisasi PNBPN Piutang Negara Rp54.657.120,00 (60,73%), dan Realisasi PNBPN Lelang Rp7.327.813.711,00 (82,21%). Total realisasi IKU persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang adalah 77,54%

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target IKU persentase penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang, diantaranya adalah:

1. Potensi penerimaan PNBPN Pengelolaan BMN rendah karena sebagian besar berupa sewa kantin, ATM, dan koperasi.
2. Banyak satker yang memiliki irisan dengan pengelolaan BMN menyetorkan PNBPN berdasarkan PNBPN fungsional K/L tersebut karena karena setiap satker mendapat target PNBPN dari Unit Eselon I masing-masing.
3. Debitur tidak memiliki kemampuan membayar, tidak mengakui utangnya, dan barang jaminan tidak dikuasai/tidak diserahkan kepada KPKNL.
4. Perekonomian masyarakat belum sepenuhnya pulih sehingga menurunkan tingkat daya beli.

Untuk menindaklanjuti permasalahan yang terjadi KPKNL Serang telah berupaya melaksanakan tindakan untuk mencapai PNBPN yang sesuai dengan target yang ditetapkan, yaitu sebagai berikut :

1. Melakukan penggalan potensi lelang untuk objek lelang yang potensial namun belum diajukan permohonan.
2. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja Kejaksaan Agung agar dapat mengajukan permohonan lelang, mengingat potensi lelang eksekusi barang rampasan cukup besar.
3. Pemetaan BKPN pencapaian target pada beberapa debitur yang potensial.

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan di masa yang akan datang untuk meningkatkan PNBPN dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang adalah:

1. Melakukan koordinasi dengan Pemohon lelang untuk melakukan lelang ulang yang berpotensi laku dan melaksanakan lelang non eksekusi sukarela/lelang produk UMKM.

2. Melakukan himbauan kepada satuan kerja di wilayah kerja KPKNL Serang agar menyetorkan PNBP berdasarkan mata anggaran pendapatan yang sesuai dengan mata anggaran pengelolaan BMN.
3. Melakukan pemetaan BKPN dalam rangka pencapaian target pada beberapa debitur yang potensial dan melakukan somasi/surat panggilan penyelesaian utang kembali kepada para debitur.

**c. Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara (Saldo PNDS s.d. 2017) (1c-CP)**

**Tabel 9**  
Capaian IKU Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara (Saldo PNDS s.d. 2017)

KPKNL SERANG	Nama Sasaran Strategis : Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal							
	Nama IKU : Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara (Saldo PNDS s.d. 2017)							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Pol/ K P
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	1%	61%	61%	63%	63%	159,04%	159,04%	
Capaian	2,91%	120%	120%	83,46%	83,46%	120%	120%	

Target *outstanding* piutang negara yang harus diselesaikan pada tahun 2021 adalah sebesar Rp1.062.338.000,00 dan realisasi pada tahun 2021 adalah sebesar Rp1.689.531.937,00 (159,04%). Dengan demikian IKU ini telah mencapai target yang ditetapkan dengan nilai capaian 120%

Dalam pencapaian target IKU Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara (Saldo PNDS s.d. 2017) ada permasalahan yang terjadi yaitu sebagian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) tidak dilengkapi dokumen pendukung seperti KTP dan Perjanjian Kredit yang menyebabkan debitur tidak mengakui adanya kewajiban yang harus diselesaikan.

Tindakan yang telah dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan dan mencapai penurunan *outstanding* yang maksimal, adalah:

1. Mengirimkan surat pemanggilan kepada debitur agar segera melunasi utangnya.
2. Menginventarisir dan memilah BKPN dengan kategori potensial dan BKPN yang tidak didukung kelengkapan dokumennya untuk dimintakan kembali ke Penyerah Piutang.
3. Melakukan somasi dan pemanggilan kepada debitur selain *crash program*.
4. Melakukan PSBDT untuk BKPN yang penyerahannya sebelum tahun 2017.

Sementara rencana aksi yang dilaksanakan oleh KPKNL Serang khususnya Seksi Piutang Negara adalah sebagai berikut :

1. Melakukan somasi/surat panggilan penyelesaian utang kembali.
2. Melakukan PSBDT untuk BKPN yang penyerahannya sebelum tahun 2018

## 2. Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

### a. Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Kekayaan Negara Dan Lelang (2a-CP)

Tabel 10

Capaian IKU Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Kekayaan Negara Dan Lelang

KPKNL SERANG	Nama Sasaran Strategis : Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	Nama IKU: Indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara dan lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Po/ K P
Target	88	88	88	88	88	88	88	Max/AVG
Realisasi	98,86	98,54	98,54	99,52	99,52	99,24	98,96	
Capaian	112,34%	111,98%	111,98%	113,09%	113,09%	112,77%	112,45%	

Target rata-rata indeks ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara dan lelang tahun 2021 sebesar 88. Sementara realisasi pada tahun 2021 sebesar 98,96 atau mencapai 112,45% dari target yang ditetapkan.

Tingginya frekuensi permohonan lelang, pengelolaan BMN, dan penilaian pada tahun 2021 menjadi tantangan untuk pencapaian target ketepatan waktu penyelesaian layanan kekayaan negara dan lelang, mengingat terbatasnya SDM pada KPKNL Serang. Tindakan yang telah dilaksanakan dalam mengatasi permasalahan dalam pencapaian target adalah memastikan penyelesaian layanan diselesaikan dengan cepat dengan monitoring surat masuk melalui aplikasi Nadine ([office.kemenkeu.go.id](http://office.kemenkeu.go.id)). Selanjutnya, rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh KPKNL Serang adalah melakukan kontrol dan monitoring surat permohonan masuk terkait layanan kekayaan negara dan lelang sehingga dapat dipastikan layanan terselesaikan dengan tepat waktu dan sesuai SOP.

## b. Persentase Realisasi Pokok Lelang (2b-CP)

Tabel 11

Capaian IKU Persentase Realisasi Pokok Lelang

KPKNL SERANG	Nama Sasaran Strategis : Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
	Nama IKU : Persentase Realisasi Pokok Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Pol/ K P
Target	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	6,95%	21,69%	21,69%	34,78%	34,78%	89,83%	89,83%	
Capaian	34,76%	54,23%	54,23%	49,68%	49,68%	89,83%	89,83%	

Target pokok lelang pada KPKNL Serang tahun 2021 sebesar Rp203.000.000.000,00 yang terbagi menjadi Pokok lelang PL Kelas I sebesar Rp184.000.000.000,00 dan pokok lelang Pegadaian sebesar Rp19.000.000.000,00. Adapun realisasi pokok lelang pada tahun 2021 adalah sebesar Rp182,357,228,732,00 atau sebesar 89,83% dari target yang ditetapkan, dengan rincian Pokok lelang PL Kelas I sebesar Rp142.241.401.432,00 dan Pokok Lelang Pegadaian sebesar Rp40.115.827.306,00.

Akar masalah dalam pencapaian target pokok lelang pada tahun 2021 adalah pemasaran yang dilakukan oleh penjual dan balai lelang belum maksimal serta daya beli masyarakat menurun imbas dari pandemi Covid-19 yang masih terjadi dan menekan perekonomian masyarakat. Dalam menindaklanjuti dalam permasalahan tersebut, KPKNL Serang telah melaksanakan langkah-langkah berupa koordinasi dengan pemohon lelang agar segera melakukan lelang ulang terhadap objek lelang yang *marketable* dan belum terjual serta objek lelang yang bernilai limit tinggi yaitu yang berada pada satuan kerja Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung, PT. BNI (Persero), Tbk., dan PT. BRI (Persero), Tbk. Selain itu juga dilakukan koordinasi dengan pemohon lelang eksekusi Hak Tanggungan dan balai lelang agar meningkatkan pemasaran objek lelang.

Selanjutnya, rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh KPKNL Serang untuk mencapai pokok lelang sesuai yang optimal adalah melakukan koordinasi dengan pemohon lelang untuk melakukan lelang ulang yang berpotensi laku dan melaksanakan lelang non eksekusi sukarela/lelang produk UMKM.

### 3. Birokrasi Dan Layanan Publik Yang *Agile*, Efektif, Dan Efisien

#### a. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL (3a-CP)

Tabel 12  
Capaian IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL

KPKNL SERANG	Nama Sasaran Strategis : Birokrasi dan layanan publik yang <i>agile</i> , efektif, dan efisien							
	Nama IKU: Indeks Kepuasan Pengguna Layanan KPKNL							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Pol/ K P
Target	-	-	-	-	-	4,57	4,57	Max/TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	4,65	4,65	
Capaian	-	-	-	-	-	101,75%	101,75%	

Indeks kepuasan pengguna jasa ini dilakukan atas jasa pelayanan kekayaan negara, pengurusan piutang negara, pelayanan lelang dan penilaian pada KPKNL Serang. Survei dilaksanakan mulai bulan Oktober 2021, dengan menyebarkan kuesioner kepada *stakeholder* KPKNL Serang. Target indeks kepuasan pengguna layanan KPKNL pada tahun 2021 adalah 4,57 dari skala 5. Realisasi yang dicapai adalah sebesar 4,65 atau 101,75% dari target yang ditetapkan.

Dalam pengukuran indeks kepuasan layanan ada beberapa kendala yang dihadapi, yaitu:

1. Perbedaan persepsi pemahaman tingkat kepuasan dari *stakeholder*.
2. Tingkat ekspektasi satuan kerja yang tinggi atas pelayanan KPKNL.
3. Proses bisnis yang panjang atas pengelolaan BMN, misalnya penghapusan BMN dengan penjualan secara lelang maka satuan kerja membuat surat permohonan 2 kali.

Terkait dengan kendala yang terjadi, KPKNL Serang melakukan beberapa upaya untuk mengatasinya yaitu dengan menyelesaikan layanan dengan tepat waktu dan memberikan pemahaman terkait alur proses dan norma waktu pelayanan kepada para *stakeholder*. Adapun rencana aksi yang akan dilakukan KPKNL Serang untuk mencapai indeks kepuasan pengguna layanan yang optimal adalah melaksanakan pelayanan sesuai prosedur dan dengan sikap yang baik, menempatkan petugas Area Pelayanan Terpadu (APT) yang cakap, menyiapkan *longlist* dan menyebarkan kuesioner pada *stakeholder*, dan meningkatkan edukasi dan pemberian informasi kepada masyarakat melalui kehumasan.

#### 4. Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara Dan Penilaian Yang Efektif

##### a. Persentase Bidang Tanah BMN Yang Disertipikatkan (4a-CP)

Tabel 13

## Capaian IKU Persentase Bidang Tanah BMN Yang Disertipikatkan

KPKNL SERANG	Nama Sasaran Strategis : Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif							
	Nama IKU: Persentase bidang tanah BMN yang disertipikatkan							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Pol/ K P
Target	-	20%	20%	60%	60%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	-	79,11%	79,11%	91,77%	91,77%	100%	100%	
Capaian	-	120%	120%	120%	120%	100%	100%	

Target bidang tanah BMN yang disertipikatkan tahun 2021 pada KPKNL Serang sebanyak 158 bidang tanah. Realisasi bidang tanah yang telah disertipikatkan pada tahun 2021 sebanyak 158 bidang tanah atau 100% dari target yang ditetapkan.

Dalam upaya pencapaian target sertifikasi BMN berupa tanah ada beberapa kendala yang dihadapi KPKNL Serang, diantaranya adalah:

1. Sebagian satuan kerja kesulitan mendapatkan bukti pelepasan hak, mengingat BMN yang disertipikatkan merupakan BMN perolehan lama sehingga dokumen pendukungnya tidak lengkap.
2. Satuan kerja tidak mengetahui batas-batas bidang tanahnya.
3. Operator BMN satuan kerja yang mengalami perubahan personil sehingga tidak tahudata histori dari tanah yang akan disertipikatkan.

Adapun tindakan yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah mengirim surat kepada satuan kerja terkait dokumen kelengkapan yang harus disiapkan guna penyelesaian sertifikasi BMN berupa tanah dan berkoordinasi dengan satuan kerja dan Kanwil BPN untuk penyelesaian target pada Semester II tahun 2021. Sementara rencana aksi yang akan dilaksanakan untuk mencapai target sertifikasi BMN berupa tanah adalah melaksanakan koordinasi dengan Kantor Pertanahan dan satuan kerja bila ada bidang tanah yang bermasalah.

## b. Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) (4b-CP)

Tabel 14

Capaian IKU Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

KPKNL SERANG	Nama Sasaran Strategis : Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif							
	Nama IKU: Persentase Implementasi Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Pol/ K P
Target	15%	45%	45%	75%	75%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	18,52%	51,85%	51,85%	100%	100%	100%	100%	
Capaian	120%	115,23%	115,23%	120%	120%	100%	100%	

Portofolio aset merupakan evaluasi kinerja aset yang dinilai dari beberapa poin, seperti kelayakan finansial, manfaat sosial, dan lain-lain. Dalam proses evaluasi digunakan data-data statistik dan proses perhitungannya menggunakan aplikasi SIMAN portofolio aset. Target tahun 2021 sebanyak 27 NUP yang dilakukan evaluasi kinerja asetnya dari tiga satuan kerja, yaitu Pengadilan Agama Serang, Pengadilan Negeri Pandeglang, dan Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung, Cidurian (BBWS C3). Realisasi jumlah NUP yang telah selesai di evaluasi pada tahun 2021 sebanyak 27 NUP atau sebesar 100% dari target yang ditetapkan.

Dalam upaya pencapaian target evaluasi kinerja BMN (portofolio aset) kendala utama yang dihadapi adalah satuan kerja belum mendapat sosialisasi terkait pengisian portofolio aset pada aplikasi SIMAN. Adapun tindakan yang telah dilakukan KPKNL Serang dalam mengatasi kendala tersebut adalah mengirim surat kepada satuan kerja terkait permintaan data dan pendampingan untuk peninjauan lapangan dan melakukan survei lapangan dan perhitungan untuk sisa target evaluasi. Rencana aksi yang akan dilakukan KPKNL Serang dalam mencapai target adalah melakukan sosialisasi pengisian portofolio aset.

### c. Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian (4c-CP)

Tabel 15  
Capaian IKU Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian

KPKNL SERANG	Nama Sasaran Strategis : Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara dan Penilaian yang Efektif							
	Nama IKU: Deviasi ketergunaan Hasil Penilaian							
T/R	Q1	Q2	Sm.l	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Pol/ K P
Target	22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%	Min/AVG
Realisasi	0%	0%	0%	0%	0%	0,03%	0,03%	
Capaian	120%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

Merupakan IKU untuk menentukan apakah nilai yang dihasilkan oleh Penilai dipakai oleh Pengelola BMN untuk menjadi dasar persetujuan pengelolaan BMN. Target deviasi ketergunaan hasil penilaian pada tahun 2021 adalah 22%. Sementara realisasi deviasi ketergunaan hasil penilaian tahun 2021 adalah sebesar 0,03% sehingga capaian pada tahun 2021 sebesar 120%.

Beberapa kendala dalam pencapaian target IKU deviasi ketergunaan hasil penilaian adalah:

1. Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan pemindahtanganan/pemanfaatan memberikan harga taksiran yang tinggi/di atas nilai wajar.
2. Pengelola Barang memberikan persetujuan dengan memberikan nilai yang lebih menguntungkan bagi negara agar terhindar dari temuan auditor meskipun nilai tersebut di atas nilai wajar.
3. Tim penilai bersifat independen dan hasil penilaian merupakan nilai wajar yang tidak terpengaruh pada nilai taksiran yang diajukan pada permohonan.

Adapun tindakan yang telah dilaksanakan untuk mengatasi kendala yang dihadapi adalah melakukan koordinasi dengan Pengelola Barang agar dapat menyesuaikan dengan nilai wajar. Sementara rencana aksi yang akan dilakukan yaitu koordinasi awal dengan Pengelola Barang terkait rencana permohonan penilaian BMN.

## 5. Penerapan Tata Kelola Piutang Negara Dan Lelang Yang Efektif

### a. Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN (5a-CP)

Tabel 16  
Capaian IKU Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN

KPKNL SERANG	Nama Sasaran Strategis: Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							
	Nama IKU: Persentase Efektivitas Penyelesaian BKPN							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Pol/KP
Target	25%	50%	50%	75%	75%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	3,53%	42,35%	42,35%	105,88%	105,88%	123,53%	123,53%	
Capaian	14,12%	84,71%	84,71%	120%	120%	120%	120%	

Target penyelesaian BKPN tahun 2021 adalah sebanyak 85 BKPN. Sementara jumlah BKPN yang diselesaikan pada tahun 2021 sebanyak 105 BKPN atau 123,53% dari target penyelesaian BKPN yang ditetapkan sehingga IKU tersebut telah mencapai target dengan nilai 120%.

Dalam mencapai target tersebut KPKNL Serang juga mengalami permasalahan seperti sebagian piutang negara tidak dilengkapi dokumen seperti KTP dan Perjanjian Kredit yang menyebabkan debitur tidak mengakui adanya kewajiban yang harus diselesaikan. Tindakan yang telah dilakukan KPKNL Serang untuk menyelesaikan BKPN adalah menyelesaikan pengembalian BKPN penyerahan dari BPJS, melaksanakan penelitian lapangan agar debitur menyelesaikan kewajibannya, pemberitahuan kembali tentang *crash program* keringanan utang kepada debitur potensial, dan merealisasikan BKPN yang direncanakan untuk dilaksanakan PSBDT. Adapun rencana aksi yang akan dilaksanakan yaitu melakukan PSBDT untuk berkas yang penyerahannya sebelum tahun 2018.

### b. Persentase Produktivitas Lelang (5b-CP)

Tabel 17  
Capaian IKU Persentase Produktivitas Lelang

KPKNL SERANG	Nama Sasaran Strategis : Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							
	Nama IKU : Persentase Produktivitas Lelang							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Pol/ K P
Target	15%	20%	20%	25%	25%	35%	35%	Max/TLK
Realisasi	36,36%	23,70%	23,70%	25,54%	25,54%	27,37%	27,37%	
Capaian	120%	118,52%	118,52%	102,15%	102,15%	78,19%	78,19%	

Target persentase produktivitas lelang pada tahun 2021 adalah sebesar 35%. Sementara frekuensi lelang pada tahun 2021 di KPKNL Serang sebanyak 581 kali,

dengan total lelang yang laku sebanyak 159 kali atau 27,37%. Sehingga pencapaian produktivitas lelang tahun 2021 adalah sebesar 78,19% dari target yang ditetapkan.

Akar permasalahan yang menyebabkan pencapaian produktivitas lelang tidak sesuai target yang diharapkan adalah barang tidak bergerak cenderung tidak likuid tidak seperti barang bergerak yang dimudah dijual kembali dan sebagian besar lelang merupakan lelang eksekusi sehingga menurunkan minat calon pembeli. Sementara tindakan yang telah dilakukan KPKNL Serang guna pencapaian target adalah melakukan penggalan potensi lelang untuk objek lelang yang potensial namun belum diajukan permohonan dan melakukan koordinasi dengan pemohon lelang hak tanggungan yang memiliki nilai limit besar untuk mengajukan lelang ulang. Adapun rencana aksi yang akan dilakukan untuk mencapai target produktivitas lelang adalah melakukan koordinasi dengan pemohon lelang untuk melakukan lelang ulang yang berpotensi laku dan melaksanakan lelang non eksekusi sukarela/lelang produk UMKM.

### c. Persentase Pelaksanaan *E-Auction* dan *E-Conventional Auction* (5c-CP)

Tabel 18

Capaian IKU Persentase Pelaksanaan *E-Auction* dan *E-Conventional Auction*

KPKNL SERANG	Nama Sasaran Strategis: Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							
	Nama IKU: Persentase Pelaksanaan <i>e-auction</i> dan <i>e-conventional auction</i>							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Po/ K P
Target	92%	92%	92%	92%	92%	92%	92%	Max/TLK
Realisasi	95,60%	98,52%	98,52%	98,10%	98,10%	96,73%	96,73%	
Capaian	104,30%	107,09%	107,09%	106,63%	106,63%	105,14%	105,14%	

Target IKU persentase pelaksanaan *e-auction* dan *e-conventional auction* pada tahun 2021 adalah 92% dari total pelaksanaan lelang pada KPKNL Serang. Jumlah pelaksanaan lelang *e-auction* pada KPKNL Serang pada tahun 2021 adalah sebanyak 562 kali dan 0 pelaksanaan lelang *e-conventional auction* dari total lelang sebanyak 581 kali. Sehingga realisasi persentase pelaksanaan *e-auction* dan *e-conventional auction* adalah 96,73% atau telah mencapai 105,14% dari target yang ditetapkan.

Hasil capaian tersebut terjadi karena pada lelang yang dilaksanakan oleh KPKNL Serang, pemohon lelang sudah melakukan permohonan secara online dan dengan adanya *e-auction* objek lelang lebih mudah terjual. Kemudian dalam upaya pencapaian target, KPKNL Serang juga melakukan sosialisasi kepada para

pemohon lelang serta penggalian potensi lelang. Adapun rencana aksi yang akan dilakukan adalah melakukan sosialisasi lelang e-auction dan e-conventional auction kepada para *stakeholder*.

#### d. Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN (5d-CP)

Tabel 19  
Capaian IKU Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN

KPKNL SERANG	Nama Sasaran Strategis: Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							
	Nama IKU: Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Pol/ K P
Target	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	12,5%	Min/AVG
Realisasi	26,50%	6,13%	6,13%	3,27%	3,27%	4,13%	4,13%	
Capaian	-12%	120%	120%	120%	120%	120%	120%	

IKU deviasi data PNBP fungsional DJKN merupakan IKU yang membandingkan dan mengukur akurasi data PNBP fungsional DJKN berupa biaya administrasi pengurusan piutang negara dan bea lelang. Untuk biaya administrasi pengurusan piutang negara data yang dibandingkan adalah data pada aplikasi Focus PN dengan data pada aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN). Sementara untuk bea lelang data yang dibandingkan adalah data pada aplikasi dropbox lelang dan aplikasi OM SPAN. Target deviasi data PNBP fungsional DJKN tahun 2021 sebesar 12,5% dengan rincian deviasi data PNBP lelang sebesar 10% dan deviasi data PNBP piutang negara sebesar 15%. Realisasi pada tahun 2021 sebesar 4,13% dengan rincian deviasi data PNBP Lelang sebesar 0% dan deviasi data PNBP piutang negara sebesar 8,25%. Dengan demikian IKU deviasi data PNBP fungsional DJKN tercapai dengan nilai 120%.

Adapun deviasi data PNBP yang terjadi pada tahun 2021 merupakan setoran dari debitor pada akhir tahun anggaran 2020 dan baru disetorkan ke kas negara pada tahun anggaran 2021 sehingga menyebabkan selisih. Tindakan yang telah dilakukan oleh KPKNL Serang dalam menjaga agar deviasi data PNBP tetap dibawah batas yang ditetapkan adalah melaksanakan koordinasi antar seksi yang berkaitan dengan PNBP fungsional yaitu, Seksi Piutang Negara, Seksi Pelayanan Lelang, dan Seksi Hukum dan Informasi. Sementara rencana aksi yang akan dilakukan adalah tetap melakukan koordinasi antar seksi agar deviasi data tidak besar.

## 6. Edukasi Yang Efektif

### a. Tingkat Efektivitas Edukasi Dan Komunikasi (6a-N)

Tabel 20  
Capaian IKU Tingkat Efektivitas Edukasi Dan Komunikasi

KPKNL SERANG	Nama Sasaran Strategis: Edukasi yang Efektif							
	Nama IKU: Tingkat Efektivitas Edukasi dan Komunikasi							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Pol/ K P
Target	-	92	92	-	-	92	92	Min/AVG
Realisasi	-	94,60	94,60	-	-	95,01	95,01	
Capaian	-	102,83%	102,83%	-	-	103,05%	103,05%	

Target tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi pada tahun 2021 sebesar 92. Realisasi pada tahun 2021 adalah 95,01 sehingga tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi telah mencapai target yang ditetapkan dengan nilai capaian 103,05%. Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target adalah kurangnya kemampuan pemateri/petugas pelayanan dalam memberikan materi yang informatif dan yang mudah dipahami. Adapun tindakan yang telah dilaksanakan dalam mengatasi permasalahan yang ada adalah melaksanakan sosialisasi untuk menyampaikan peraturan atau kebijakan terbaru. Dalam upaya mempertahankan tingkat efektivitas edukasi dan komunikasi, KPKNL Serang memiliki rencana aksi untuk meningkatkan kemampuan pejabat/pegawai pada seksi teknis melalui pendidikan dan latihan yang sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

## 7. Pengawasan Dan Pengendalian Yang Efektif

### a. Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Aset (7a-CP)

Tabel 21  
Capaian IKU Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Aset

KPKNL SERANG	Nama Sasaran Strategis: Pengawasan dan Pengendalian yang Efektif							
	Nama IKU: Persentase Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Aset							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Pol/ K P
Target	-	40%	40%	-	-	85%	85%	Max/TLK
Realisasi	-	50%	50%	-	-	88,24%	88,24%	
Capaian	-	120%	120%	-	-	103,81%	103,81%	

Target IKU persentase tindak lanjut pengelolaan aset pada tahun 2021 sebesar 85%, dengan trajectory IKU pada Triwulan II dan Triwulan IV 2021. Realisasi pada tahun 2021 adalah sebesar 88,24% atau sebesar 103,81% dari target yang ditetapkan.

Permasalahan yang dihadapi KPKNL Serang dalam pencapaian target adalah rendahnya tingkat kesadaran satuan kerja untuk melaporkan tindak lanjut persetujuan pengelolaan BMN yang telah dikeluarkan KPKNL. Dalam menindaklanjuti permasalahan yang terjadi KPKNL Serang melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap satuan kerja yang telah menerima persetujuan pengelolaan BMN dan melakukan koordinasi dengan satuan kerja dan melakukan pemantauan terhadap persetujuan yang sudah terbit. Sementara itu rencana aksi yang akan dilakukan KPKNL Serang adalah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap persetujuan pengelolaan BMN yang telah diterbitkan ke satuan kerja.

## 8. Sumber Daya Manusia Yang Kompeten

### a. Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai (8a-N)

Tabel 22  
Capaian IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

KPKNL SERANG	Nama Sasaran Strategis: Sumber Daya Manusia yang Kompeten							
	Nama IKU: Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Pol/ K P
Target	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%	Max/TLK
Realisasi	10,91%	40%	40%	107,62%	107,62%	120%	120%	
Capaian	72,73%	100%	100%	120%	120%	120%	120%	

Pemenuhan kriteria apabila pegawai memenuhi 24 Jam Pelatihan dengan jenis pengembangan kompetensi mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.01/2018. Target IKU Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai pada tahun 2021 sebesar 100%. Capaian pengembangan kompetensi pegawai pada tahun 2021 sebanyak 21 pegawai telah memenuhi kriteria dan melebihi kriteria sehingga realisasi tahun 2021 adalah sebesar 120% dan telah memenuhi target yang ditetapkan.

Kendala yang dihadapi dalam pengembangan kompetensi pegawai adalah persyaratan beberapa pendidikan dan pelatihan yang tidak bisa dipenuhi oleh calon peserta pendidikan dan pelatihan. Sementara tindakan yang telah

dilaksanakan dalam upaya pencapaian target adalah menginformasikan jadwal pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kepada pegawai secara rutin setiap bulannya dan menghimbau pegawai untuk menyampaikan pendidikan dan pelatihan yang akan diikuti kepada Subbagian Umum KPKNL Serang. Rencana aksi yang akan dilakukan KPKNL Serang untuk memenuhi target pengembangan kompetensi pegawai adalah menyusun nota dinas usulan pendidikan dan pelatihan setiap bulan, meminta atasan langsung pegawai untuk mendukung bawahan agar mengusulkan pendidikan dan pelatihan, dan berkonsultasi dengan Kepala Kantor terkait persetujuan pendidikan dan pelatihan pegawai.

## 9. Organisasi Yang *Fit For Purpose*

### a. Nilai Hasil Review Pengelolaan Kinerja Berbasis BSC (9a-N)

Tabel 23

Capaian IKU Nilai Hasil Review Pengelolaan Kinerja Berbasis BSC

KPKNL SERANG	Nama Sasaran Strategis: Organisasi yang <i>fit for purpose</i>							
	Nama IKU: Nilai hasil review pengelolaan kinerja berbasis BSC							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Pol/ K P
Target	-	-	-	-	-	75	75	Max/TLK
Realisasi	-	-	-	-	-	95,19	95,19	
Capaian	-	-	-	-	-	120%	120%	

Review Pengelolaan Kinerja berbasis BSC terdiri dari perencanaan kinerja sebesar 25%, pelaksanaan/eksekusi kinerja sebesar 30%, monitoring dan evaluasi kinerja sebesar 30%, dan intensitas edukasi kinerja sebesar 15%. Target nilai hasil Review Pengelolaan Kinerja Berbasis BSC pada tahun 2021 adalah sebesar 75 dengan realisasi mencapai 95,19 atau telah mencapai target dengan nilai capaian 120%.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target IKU ini adalah terkait dengan penyusunan Kontrak Kinerja, untuk manual IKU terutama CP masih sering mengalami perubahan-perubahan di tengah jalan sehingga perlu usaha lebih untuk mempelajari perubahan tersebut serta dikuatkan akan terjadi kesalahan karena kurang update atas perubahan tersebut.

Tindakan yang telah dilaksanakan oleh KPKNL Serang dalam mencapai nilai yang ditargetkan adalah menyusun Kontrak Kinerja sesuai petunjuk yang disampaikan oleh Kantor Pusat DJKN, mendokumentasikan semua kegiatan pengelolaan kinerja dengan baik dan benar, dan melakukan monitoring dan evaluasi atas

capaian kinerja organisasi. Adapun rencana aksi yang akan dilakukan adalah menyusun Kontrak Kinerja sesuai petunjuk yang disampaikan oleh Kantor Pusat DJKN.

#### b. Indeks Efektivitas Penyelenggaraan FGD Pejabat Administrator (9b-N)

Tabel 24

Capaian IKU Indeks Efektivitas Penyelenggaraan FGD Pejabat Administrator

KPKNL SERANG	Nama Sasaran Strategis: Organisasi yang <i>fit-for-purpose</i>							
	Nama IKU: Indeks efektivitas penyelenggaraan FGD Pejabat Administrator							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Pol/ K P
Target	80	80	80	80	80	80	80	Max/TLK
Realisasi	94,40	94,40	94,40	94,40	94,40	98,90	96,65	
Capaian	118%	118%	118%	118%	118%	120%	120%	

Tingkat efektivitas penyelenggaraan FGD Pejabat Administrator adalah instrumen untuk mengukur tingkat keaktifan Pejabat Administrator dalam melakukan komunikasi internal melalui FGD pegawai dibawahnya termasuk feedback dari pegawai. Target Indeks Efektivitas Penyelenggaraan FGD Pejabat Administrator pada tahun 2021 adalah 80 dan realisasinya adalah 96,65 sehingga telah memenuhi target dengan nilai capaian 120%.

Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target IKU ini adalah tingkat pemahaman bawahan atas pemaparan yang disampaikan oleh Pejabat Administrator. Adapun tindakan serta rencana aksi yang dilakukan untuk memenuhi pencapaian target adalah melaksanakan FGD Pejabat Administrator setiap triwulannya.

## 10. Pengelolaan Keuangan Dan BMN Yang Optimal

### a. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (10a-CP)

Tabel 25  
Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran

KPKNL SERANG	Nama Sasaran Strategis: Pengelolaan Anggaran yang Optimal							
	Nama IKU: Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran							
T/R	Q1	Q2	Sm.I	Q3	s.d. Q3	Q4	Y-21	Pol/ K P
Target	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	Max/TLK
Realisasi	98,90%	97,45%	97,45%	98,02%	98,02%	95,45%	95,45%	
Capaian	120%	102,04%	102,04%	102,64%	102,64%	99,95%	99,95%	

Target IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran pada tahun 2021 sebesar 95,5% dengan realisasi sebesar 95,45% atau sebesar 99,95% dari target yang ditetapkan.

Permasalahan yang dialami oleh KPKNL Serang dalam mencapai target adalah:

1. Perubahan formula perhitungan yang baru diinformasikan pada akhir tahun yang kebijakannya bertolak belakang dengan kebijakan sebelumnya di bulan September (ada perubahan target penyerapan anggaran Q3 yang semula 60% naik menjadi 70%) sehingga penyerapan KPKNL Serang di Triwulan III tahun 2021 meningkat tapi bertolak belakang dengan perhitungan PKPA yang terbaru.
2. Tidak tercapainya output Risalah Lelang sehingga mengurangi Nilai PCRO di SAKTI dan Mempengaruhi Nilai PKPA.

Tindakan yang telah diupayakan oleh KPKNL Serang dalam mencapai target adalah melakukan koordinasi dengan semua seksi mengenai Rencana Kerja dan Penarikan Dana setiap Triwulan. Adapun rencana aksi yang dilakukan oleh KPKNL Serang adalah meningkatkan koordinasi dengan semua seksi mengenai rencana kerja dan penarikan dana setiap triwulan, mengidentifikasi mata anggaran yang bisa dilakukan penghematan, dan melakukan monitoring pelaksanaan anggaran setiap bulan.

## B. KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN

Perhitungan capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran tahun 2021 yaitu berdasarkan SE-8/MK.1/2021 tentang Tata Cara Perhitungan Indikator Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran di Lingkungan Kementerian Keuangan terdiri atas perhitungan nilai IKPA dan nilai SMART DJA. Nilai IKPA terdiri atas 13 (tiga belas) komponen yang terdiri dari Pengelolaan UP, Data Kontrak, Kesalahan SPM, Retur SP2D, Halaman III DIPA, Revisi DIPA, Penyelesaian Tagihan, Kinerja Capaian Output, Rekonsiliasi LPJ, Perencanaan Kas, Realisasi Anggaran, Pagu Minus, dan Dispensasi SPM. Perhitungan capaian kinerja yang terbagi dalam nilai IKPA dan nilai SMART DJA tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 26**  
**Capaian Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran KPKNL Serang**  
**Tahun Anggaran 2021**

Indikator IKU Kualitas Pelaksanaan Anggaran		Capaian
<b>A)</b>	<b>Nilai IKPA</b>	<b>98,49%</b>
	1. Pengelolaan UP	8,00%
	2. Data Kontrak	10,00%
	3. Kesalahan SPM	5,00%
	4. Retur SP2D	5,00%
	5. Hal III DIPA	4,00%
	6. Revisi DIPA	5,00%
	7. Penyelesaian Tagihan	10,00%
	8. Kinerja Capaian Output	16,77%
	9. Rekon LPJ	5,00%
	10. Perencanaan Kas	0,00%
	11. Realisasi	14,80%
	12. Pagu Minus	5,00%
	13. Dispensasi SPM	5,00%
<b>B)</b>	<b>Nilai SMART</b>	<b>93,42%</b>
<b>Capaian Triwulan IV</b>		<b>95,45%</b>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja KPKNL Serang tahun 2021 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2021 dan disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja KPKNL Serang tahun 2021 memuat capaian-capaian kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen kontrak kinerja yang dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2021. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/29/M.PAN/5/2010 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Berdasarkan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, pencapaian kinerja KPKNL Serang ada yang berhasil melampaui target, namun ada pula yang belum mencapai target sebagaimana yang telah ditetapkan. Dari 12 (dua belas) Sasaran Strategis yang menjadi tanggung jawab KPKNL Serang, terdapat 10 (sepuluh) Sasaran Strategis yang mencapai target, dan 2 (dua) Sasaran Strategis yang belum dapat memenuhi target yang ditentukan.

Terhadap 2 (dua) Sasaran Strategis yang realisasinya belum tercapai 100%, yaitu untuk Sasaran Strategis Pengelolaan Lelang yang Optimal dan Sasaran Strategis Tata Kelola Lelang yang Efektif akan dilakukan evaluasi dan upaya perbaikan agar pada tahun yang akan datang dapat mencapai target yang ditetapkan.